

PENGEMBANGAN APLIKASI E-PPID UNTUK DESA SIDOKARE, KABUPATEN NGANJUK: TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

DEVELOPMENT OF THE E-PPID APPLICATION FOR SIDOKARE VILLAGE,
NGANJUK DISTRICT: TRANSPARENCY OF PUBLIC INFORMATION

Putri Anggun M.C^{1*}, Dipha Andimorgan¹, Qonitatul Hasanah¹

*E-mail: E41211712@student.polije.ac.id

¹Jurusan Teknologi Informasi, Teknik Informatika Kampus 3 Nganjuk, Politeknik Negeri Jember

Abstrak

Pelayanan PPID di desa Sidokare masih menggunakan manual yaitu masyarakat datang ke kantor desa dengan membawa persyaratan. Oleh karena itu diperlukan teknologi atau aplikasi yang diharapkan dapat mengurangi kesalahan input data, meningkatkan kinerja pelayanan di kantor Desa Sidokare dan mendorong transparansi antara pegawai dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua cara yaitu studi dokumenter dan analisis data sekunder. Sedangkan tahap pelaksanaan menggunakan Metode Waterfall mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, integrasi dan pengujian serta pemeliharaan. Hasil analisa website tersebut adalah warga desa Sidokare mengalami kesulitan dalam melakukan pengajuan PPID dan pengajuan kembali (keberatan) ketika informasi yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mendukung upaya transparasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapat informasi maka penulis akan membuat perancangan aplikasi E-PPID. Permohonan informasi online dinilai lebih efektif karena aksesibilitas dapat melakukan permohonan kapan saja dan dimana saja dengan koneksi internet. Dapat lebih mudah dan cepat, formulir tersedia dengan format digital yang dapat diisi secara langsung serta dapat menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan. Permohonan informasi online memungkinkan untuk pembatasan interaksi langsung. Tetapi terdapat kontak yang dapat dihubungi untuk bertanya penjelasan lebih lanjut.

Kata kunci: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Transparasi Data, Aplikasi E-PPID, Pengajuan PPID

Abstract

The Public Information and Documentation Service (PPID) in Sidokare Village still operates manually, where residents visit the village office with their required documents. Therefore, the implementation of technology or an application is needed to reduce data input errors, improve service performance at the Sidokare Village office, and promote transparency between officials and the community. Two data collection techniques were employed, namely documentary study and secondary data analysis. The implementation phase followed the Waterfall Method, encompassing requirements analysis, system design, implementation, integration, testing, and maintenance. The analysis of the website revealed that residents of Sidokare Village face difficulties in submitting PPID requests and filing appeals when the obtained information does not align with their expectations. Consequently, to support transparency efforts and provide convenience for the community in accessing information, the author intends to design an E-PPID application. Online information requests are considered more effective due to their accessibility, allowing users to submit requests anytime and anywhere with an internet connection. This approach offers convenience, as digital forms can be filled out directly and necessary supporting

documents can be attached. Online information requests also allow for limiting direct interactions, although there are contact details available for further inquiries.

Keywords: Public Information and Documentation Service (PPID), Data Transparency, E-PPID application, PPID requests

1. PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi, informasi menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap manusia [1]. Komunikasi adalah keharusan bagi manusia karena dengan komunikasi beberapa kebutuhan manusia akan terpenuhi, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan kepentingan informasi [2]. Pengembangan teknologi yang sangat pesat membawa pengaruh luas bagi kehidupan masyarakat [3]. Perubahan pola hidup dan interaksi dalam kehidupan akan meningkat dapat meningkat dengan adanya komunikasi [4]. Komunikasi dan penyebaran informasi saat ini semakin mudah dan cepat karena dapat dilakukan secara jarak jauh menggunakan *smartphone* [5].

PPID merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang bertanggung jawab dalam mengelola dokumen publik sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi melalui satu pintu. PPID memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dari PPID Pelaksana di setiap unit/satuan kerja, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi kepada publik. PPID juga melakukan verifikasi dan pemutakhiran informasi serta menyediakan akses informasi dan dokumentasi kepada masyarakat [6]

Aplikasi E-PPID dapat memudahkan masyarakat Sidokare dalam proses Permohonan Informasi. Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu menghadirkan pelayanan informasi yang efisien, tepat waktu, ekonomis, dan dengan prosedur yang sederhana. [7] Namun, di wilayah Nganjuk, terutama di Desa Sidokare, pelayanan PPID masih tergolong rumit. Masyarakat Sidokare diwajibkan untuk mengunjungi Kantor Desa selama jam kerja dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentu mempersulit masyarakat yang bekerja sehingga harus meminta dispensasi untuk mengurus permohonan informasi. Permintaan informasi akan diproses hanya setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, kesalahan dalam penginputan data dalam permohonan sering terjadi karena kurangnya kecermatan. Kesalahan penginputan data atau permohonan akan mengharuskan pemohon untuk melakukan permohonan ulang. Kondisi ini mengakibatkan pemohon harus berkunjung berulang kali ke Kantor Desa, yang pada akhirnya memerlukan waktu lebih lama. Banyak juga masyarakat Sidokare yang belum mengetahui tempat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mengakses berita-berita penting yang berkaitan dengan Desa Sidokare.

Hasil penelitian Styawati, dkk[8] yang berjudul “Penerapan Aplikasi Administrasi Desa pada Desa Mukti Karta Mesuji” menunjukkan bahwa aplikasi administrasi Desa Mukti Karya membuat pelayanan lebih cepat karena warga dapat mengunduh surat yang dibutuhkan pada aplikasi administrasi desa. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi staf desa dalam melakukan pelayanan terkait pengajuan surat yang dibutuhkan oleh warga Desa Mukti Karya Mesuji. Namun, aplikasi tetap mengharuskan masyarakat Desa Mukti Karya Mesuji untuk datang ke kantor desa untuk mengisi data yang dibutuhkan.

Penelitian lainnya yang berjudul Penerapan Aplikasi Web untuk Administrasi di Desa Sidosari Lampung Selatan oleh Jaka persada, dkk[9] menyatakan bahwa aplikasi web ini digunakan untuk melayani dan mencatat kependudukan di Desa Sidosari, Lampung Selatan. Aplikasi ini dimaksimalkan untuk pengarsipan dokumen masyarakat sehingga dapat mengurangi resiko kehilangan data.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, Pengembangan aplikasi E-PPID dapat mendukung pengelolaan pelayanan di Desa Sidokare. Teknologi atau aplikasi tersebut diharapkan

dapat mengurangi kesalahan input data, meningkatkan kinerja pelayanan di kantor Desa Sidokare, serta mendorong transparansi antara pegawai dan masyarakat. Selain itu, teknologi atau aplikasi ini juga diharapkan memberikan efisiensi bagi masyarakat, di mana mereka dapat mengajukan permohonan informasi melalui smartphone mereka tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Setelah melalui proses verifikasi, pegawai desa akan mengirimkan informasi yang diminta oleh pemohon dalam bentuk file. Dengan demikian, penerapan teknologi atau aplikasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem pelayanan informasi di Desa Sidokare.

2. METODOLOGI

2.1 Tempat dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Pada tanggal 20-06-2023

2.2 Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah staf kantor Desa Sidokare dan Masyarakat yang tinggal di Desa Sidokare

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar tujuan dalam kegiatan dapat tercapai:

1. Studi dokumenter

Studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan(sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh [10]

2. Analisis data sekunder

Manfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh organisasi lain atau sumber data yang tersedia untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Data sekunder dapat berasal dari lembaga pemerintah, institusi riset, atau organisasi masyarakat lainnya.

2.4 Tahap Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan oleh penulis adalah Metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Metode Waterfall

1. Analisa Kebutuhan

Tahapan pertama adalah menganalisa kebutuhan. Analisa kebutuhan meliputi analisa sistem dan juga analisa software. Penulis menggunakan metode research untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang terkait dengan Desa Sidokare.

2. Desain Sistem

Tahapan kedua adalah proses perancangan dan pengembangan berdasarkan analisa kebutuhan pengguna. Perancangan desain sistem dapat mempermudah proses pengerjaan dan mendapatkan gambaran detail tampilan sistem aplikasi Desa Sidokare.

3. Implementasi

Tahapan ketiga adalah implementasi menggunakan kode bahasa pemrograman. Proses pengembangan sistem aplikasi Desa Sidokare akan melalui tahapan modul modul yang terpisah yang selanjutnya akan digabungkan. Dalam pengembangan sistem aplikasi Desa Sidokare menggunakan bahasa pemrograman dart dengan framework flutter berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat.

4. Integrasi dan Pengujian

Pengujian sistem aplikasi Desa Sidokare akan dilakukan secara manual dan otomatis. Pengujian manual akan menggunakan metode black box sedangkan pengujian otomatis menggunakan Appium.

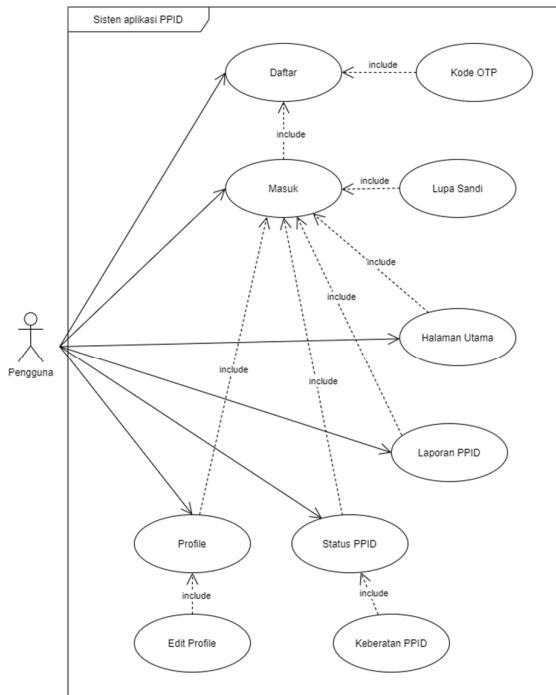
5. Pemeliharaan

Tahap ini merupakan bagian akhir pada metode waterfall, perangkat lunak yang sudah lolos tahap pengujian, maka masuk tahap operasional dan pemeliharaan. Pemeliharaan ini mencakup perbaikan kesalahan atau bug dan peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna dan masukan dari pengguna yang menggunakan perangkat lunak tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori dan metodologi yang telah dijelaskan, pengembangan aplikasi E-PPID untuk desa Sidokare sebagai transparansi informasi publik menggunakan website desa Sidokare yang dapat diakses melalui laman nganjuk.kab.go.id sebagai referensi utama. Hasil analisa website tersebut adalah warga desa Sidokare mengalami kesulitan dalam melakukan pengajuan PPID dan pengajuan kembali (keberatan) ketika informasi yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mendukung Upaya transparasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapat informasi maka penulis akan membuat perancangan aplikasi E-PPID.

3.1 Rancangan Sistem



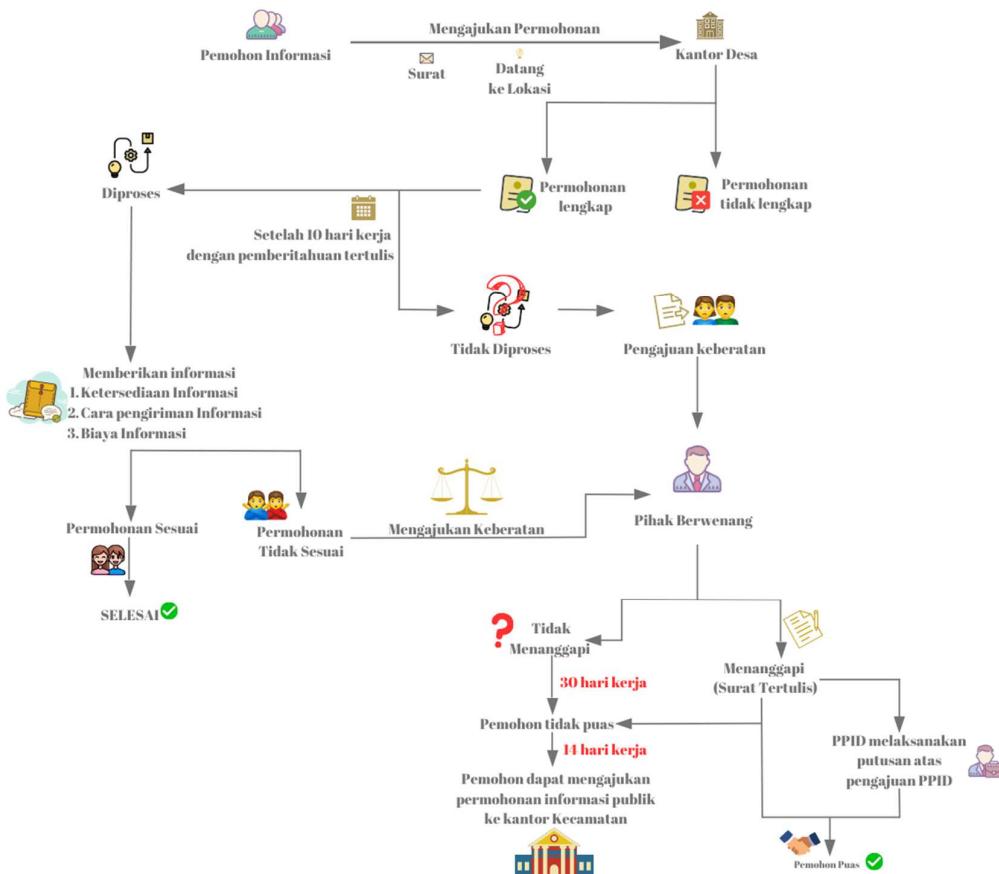
Gambar 1. *Use case* Rancangan Sistem E-PPID

Use case pertama (Gambar 1) adalah ‘Daftar’. Aktor utama dalam *Use case* ini adalah pengguna sistem. Langkah-langkah dalam *Use case* ini dimulai ketika pengguna memasukan data diri yang diperlukan untuk mendaftarkan akun. Kemudian lanjut ke *Use case* anakan ‘Kode OTP’ untuk menverifikasi akun. *Use case* yang kedua adalah ‘Masuk’. Aktor utama dalam *use case* ini adalah pengguna sistem. Langkah-langkah dalam *use case* ini dimulai ketika pengguna memasukan username dan password yang diperlukan untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna dapat masuk ke *use case* anakan ‘Lupa Sandi’ apabila ingin merubah sandi akun. *Use case* selanjutnya adalah ‘Halaman Utama’. Aktor utama dalam *use case* ini adalah pengguna sistem.

Use case yang ke empat adalah ‘Laporan PPID’. Aktor utama dalam *Use case* ini adalah pengguna sistem. Langkah-langkah dalam *Use case* ini dimulai ketika pengguna mengisi nomor telepon dengan maksimal 13 angka, alamat email, judul laporan, isi laporan, alamat, detail alamat berupa RT dan RW, kategori PPID, serta dapat menyertakan file pendukung. yang diperlukan untuk masuk ke dalam system. *Use case* yang ke lima adalah “Status PPID”. Aktor utama dalam *Use case* ini adalah pengguna sistem. Pada *Use case* ini pengguna dapat melihat status laporan dalam halaman status PPID dan mengajukan keberatan ke *use case* anakan ‘Keberatan PPID’ apabila hasil pengajuan PPID tidak sesuai dengan permintaan. *Use case* yang terakhir adalah ‘Profile’. Aktor utama dalam *use case* ini adalah pengguna sistem. Di dalam *use case* ini pengguna dapat melihat informasi akun. Apabila pengguna ingin mengedit data akun dapat masuk ke *use case* anakan ‘Edit Profile’.

3.2 Perbandingan alur PPID

Alur Kerja Sistem Pengajuan PPID secara Manual

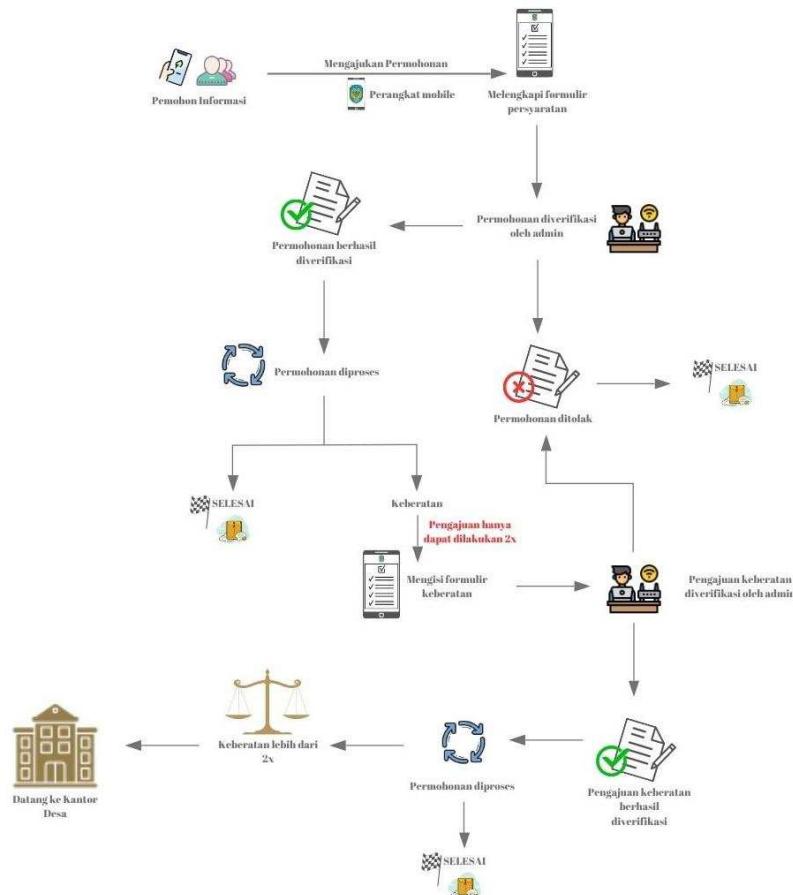


Gambar 2. Alur Kerja Sistem Pengajuan PPID secara Manual

Pada Gambar 2 dijelaskan alur kerja sistem pengajuan PPID secara manual. Pemohonan informasi PPID secara manual dapat diajukan melalui surat atau datang ke kantor desa dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Jika persyaratan permohonan lengkap maka dapat diproses untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan informasi, cara pengiriman informasi dan biaya informasi. Apabila telah selesai maka permohonan selesai. Namun, jika permohonan tidak sesuai maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada pihak berwenang. Apabila pihak berwenang menanggapi melalui surat tertulis maka PPID melaksanakan keputusan pengajuan PPID berdasarkan permintaan hingga pemohon merasa puas.

Apabila pihak berwenang tidak menanggapi lebih dari 30 hari kerja yang menyebabkan pemohon merasa tidak puas maka pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik ke kantor Kecamatan setelah 14 hari kerja.

Alur Kerja Sistem Pengajuan E-PPID secara Online



Gambar 3. Alur Kerja Sistem Pengajuan E-PPID secara Online

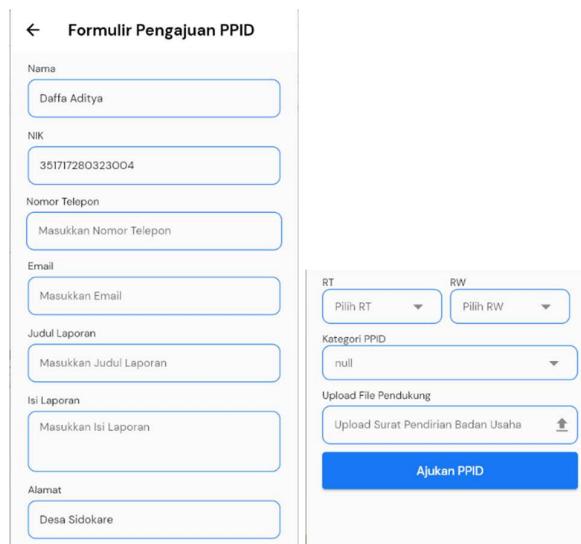
Pada Gambar 3 dijelaskan alur kerja sistem pengajuan E-PPID secara online. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan menggunakan perangkat *mobile* masing – masing. Pemohon informasi wajib melengkapi formulir persyaratan untuk diverifikasi oleh admin. Apabila permohonan ditolak maka kasus akan selesai dan pemohon dapat mengajukan ulang. Apabila permohonan berhasil diverifikasi maka permohonan akan diproses hingga selesai, apabila telah sesuai pemohon dapat mengunduh file permohonan, apabila belum sesuai maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan. Tahap selanjutnya adalah pengajuan keberatan akan diverifikasi oleh admin. Apabila pengajuan ditolak maka selesai dan dapat mengajukan ulang. Apabila pengajuan keberatan diverifikasi dan disetujui maka permohonan akan diproses hingga selesai. Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan 2 kali, apabila masih terdapat ketidakpuasan setelah 2 kali pengajuan keberatan maka pemohon dapat mendatangi kantor desa.

3.3 Implementasi User Interface



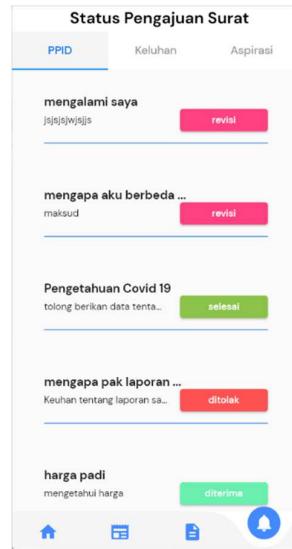
Gambar 4. Tampilan *User Interface* Halaman Masuk

Gambar 4 menunjukkan halaman masuk. Pengguna dapat masuk ke sistem dengan mengisi email dan kata sandi yang digunakan ketika daftar.



Gambar 5. Tampilan *User Interface* Halaman Formulir Pengajuan PPID

Pada Gambar 5 menunjukkan formulir pengajuan PPID bertujuan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, pengajuan PPID dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum dan badan usaha. Pada halaman formulir pengajuan PPID nama dan NIK pengguna akan sesuai dengan data yang digunakan ketika daftar. Pengguna wajib mengisi nomor telepon dengan maksimal 13 digit angka, alamat email, judul laporan, isi laporan, alamat, detail alamat berupa RT dan RW, kategori PPID, serta dapat menyertakan file pendukung. Formulir pengajuan PPID hanya dapat diakses oleh warga desa Sidokare yang telah memiliki akun.



Gambar 6. Tampilan *User Interface* Halaman Status PPID

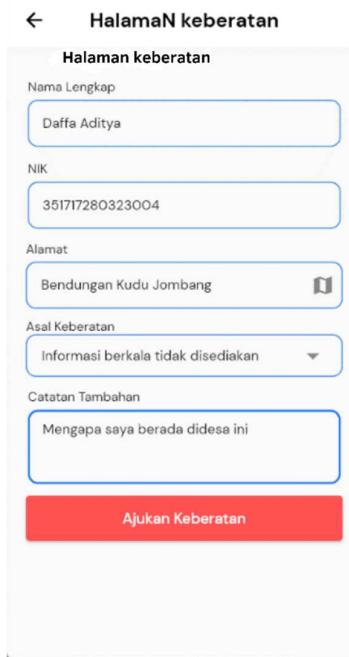
Gambar 6 menunjukkan langkah setelah mengisi formulir pengajuan PPID yaitu mengecek status laporan pengajuan. Status pengajuan surat akan ditinjau dan diubah oleh pihak yang berwenang melalui website. Status pengajuan PPID akan berubah menjadi diterima setelah proses verifikasi, kemudian pengajuan PPID akan diproses dan apabila telah selesai maka status akan diubah menjadi selesai. Pengajuan PPID oleh pengguna akan ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Setelah selesai pengguna dapat melihat detail pengajuan PPID untuk mengetahui apakah pengajuan yang diperlukan telah sesuai dan pengguna merasa puas.



Gambar 7. Tampilan *User Interface* Halaman Detail Pengajuan PPID

Pada Gambar 7 menunjukkan halaman detail pengajuan PPID dapat dibuka ketika klik setelah proses pengajuan selesai. Pengguna dapat melihat hasil pengajuan PPID berupa file

PDF. Apabila telah sesuai dengan yang dimaksutkan oleh pengguna maka pengguna dapat klik selesai. Namun, apabila belum sesuai pengguna dapat mengajukan keberatan dengan klik button keberatan untuk diarahkan ke halaman berikutnya.



← Halaman keberatan

Halaman keberatan

Nama Lengkap
Daffa Aditya

NIK
351717280323004

Alamat
Bendungan Kudu Jombang

Asal Keberatan
Informasi berkala tidak disediakan

Catatan Tambahan
Mengapa saya berada didesa ini

Ajukan Kebenaran

Gambar 8. Tampilan *User Interface* Halaman Keberatan

Pada Gambar 8 menunjukkan tampilan halaman keberatan. Ketika *user* telah memperoleh hasil pengajuan PPID, tetapi hasil pengajuan PPID tersebut tidak sesuai dengan harapan, pengguna dapat mengajukan keberatan dengan menambahkan catatan dan alasan tambahan pada detail laporan. Terdapat tombol keberatan yang memungkinkan pengajuan keberatan, namun keberatan hanya dapat diajukan jika status laporan yang diajukan belum selesai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, kesimpulan yang dihasilkan telah secara jelas menjawab tujuan dari pembuatan aplikasi E-PPID ini. Aplikasi E-PPID dapat mempermudah masyarakat Sidokare dalam proses permohonan informasi. Permohonan informasi secara online melalui perangkat mobile masing – masing dinilai lebih efektif karena aksesibilitas online memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan kapan saja dan dimana saja dengan koneksi internet. sedangkan permohonan informasi secara *offline* pemohon harus mendatangi kantor desa pada jam kerja untuk mengambil formulir dan menyerahkan persyaratan kepada pihak berwenang. Permohonan informasi secara online dapat lebih mudah dan cepat karena formulir tersedia dengan format digital yang dapat diisi secara langsung serta dapat menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan. Permohonan informasi secara offline memerlukan waktu dan ketelitian karena harus mengisi formulir secara manual. Selain itu permohonan informasi juga dapat menimbulkan antrian sehingga memakan banyak waktu. Permohonan informasi secara online memungkinkan untuk pembatasan interaksi langsung yang tentu juga berbeda dengan pengajuan surat secara offline yang dapat berinteraksi langsung dengan pihak yang berwenang. Tetapi pada permohonan

secara online terdapat kontak yang dapat dihubungi apabila pemohon perlu bertanya atau penjelasan lebih lanjut.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] H. Silvana, G. Rullyana, and A. Hadiapurwa, ‘Kebutuhan Informasi Guru Di Era Digital: Studi Kasus Di Sekolah Dasar Labschool Universitas Pendidikan Indonesia’, *Baca: jurnal dokumentasi dan informasi*, vol. 40, no. 2, pp. 147–158, 2019.
- [2] M. Sari and R. Mulyadi, ‘Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) kabupaten bungo dalam pemenuhan ketersediaan informasi publik’, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 3, no. 2, pp. 109–118, 2020.
- [3] M. Danuri, ‘Perkembangan dan transformasi teknologi digital’, *Jurnal Ilmiah Infokam*, vol. 15, no. 2, 2019.
- [4] M. Ngafifi, ‘Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya’, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1, 2014.
- [5] R. S. Daulay, H. Pulungan, A. Noviana, and S. Hurhaliza, ‘Manfaat Teknologi Smartphone Di Kalangan Pelajar Sebagai Akses Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona-19’, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 15, 2020.
- [6] nbl/nan/HUMAS MENPANRB, ‘PPID Sebagai Pintu Keterbukaan Informasi Publik untuk Wujudkan “Good Governance”’, *Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi*, Apr. 13, 2021.
- [7] J. E. Pujiyantoro, A. N. Saputra, A. M. Leksono, and S. Setiawan, ‘Perancangan Sistem Informasi Desa (Sidesaka) Berbasis Web Pada Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas’, *Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 23–31, Apr. 2023, doi: 10.31294/abditeknika.v3i1.1756.
- [8] S. Styawati, S. Samsugi, Y. Rahmanto, A. Surahman, L. Andraini, and I. Ismail, ‘PENERAPAN APLIKASI ADMINISTRASI DESA PADA DESA MUKTI KARYA MESUJI’, *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, vol. 3, no. 1, p. 123, Mar. 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1910.
- [9] J. P. Sembiring, ‘PENERAPAN APLIKASI WEB UNTUK ADMINISTRASI DI DESA SIDOSARI LAMPUNG SELATAN’, *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, vol. 3, no. 1, p. 70, Mar. 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1771.
- [10] N. Nilamsari, ‘MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF’, 2014. [Online]. Available: <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>